



**BADAN
PERFILMAN
INDONESIA**

RDCPU

DPR RI

OUTLINE

1. Tentang Badan Perfilman Indonesia
2. Masalah Perfilman Indonesia Dulu dan Sekarang
3. Kondisi Perfilman Indonesia Saat Ini
4. Kebangkitan Perfilman Nasional
5. Usulan

Badan Perfilman Indonesia (BPI)

1. Dibentuk atas amanat Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
2. Dikukuhkan melalui Keputusan Presiden No. 32 tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia.

PASAL 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perfilman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. apresiasi dan promosi film;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan perfilman;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman;
 - d. pengarsipan film;
 - e. kineklub;
 - f. museum perfilman;
 - g. memberikan penghargaan;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. memberikan masukan perfilman; dan/atau
 - j. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film luar negeri.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.

PASAL 68

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dibentuk badan perfilman Indonesia.
- (2) Pembentukan badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
- (3) Badan perfilman Indonesia merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (4) Badan perfilman Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (5) Badan perfilman Indonesia dikukuhkan oleh Presiden.

PASAL 69

Badan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 bertugas untuk:

- a. menyelenggarakan festival film di dalam negeri;
- b. mengikuti festival film di luar negeri;
- c. menyelenggarakan pekan film di luar negeri;
- d. mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing;
- e. memberikan masukan untuk kemajuan perfilman;
- f. melakukan penelitian dan pengembangan perfilman;
- g. memberikan penghargaan; dan
- h. memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.

Stakeholder BPI

Badan Perfilman Indonesia

Pendidikan

Terintegrasi

1

Belum Terintegrasi

2

SMK, Lembaga Kursus

Usaha

Terintegrasi

9

Belum Terintegrasi

750

PH, Distributor, TV, OTT

Profesi

Terintegrasi

19

Belum Terintegrasi

2

Kurator, Kritikus Film

Kegiatan

Terintegrasi

33

Belum Terintegrasi

500

Apresiasi, Literasi



PASAL 70

(1) Sumber pembiayaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berasal dari:

- a. pemangku kepentingan; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Dewas

Dewan Etik

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Bendahara Umum

Ketua Bidang Organisasi dan Jaringan

Ketua Bidang PSDM dan Stankom

Ketua Bidang Litbang

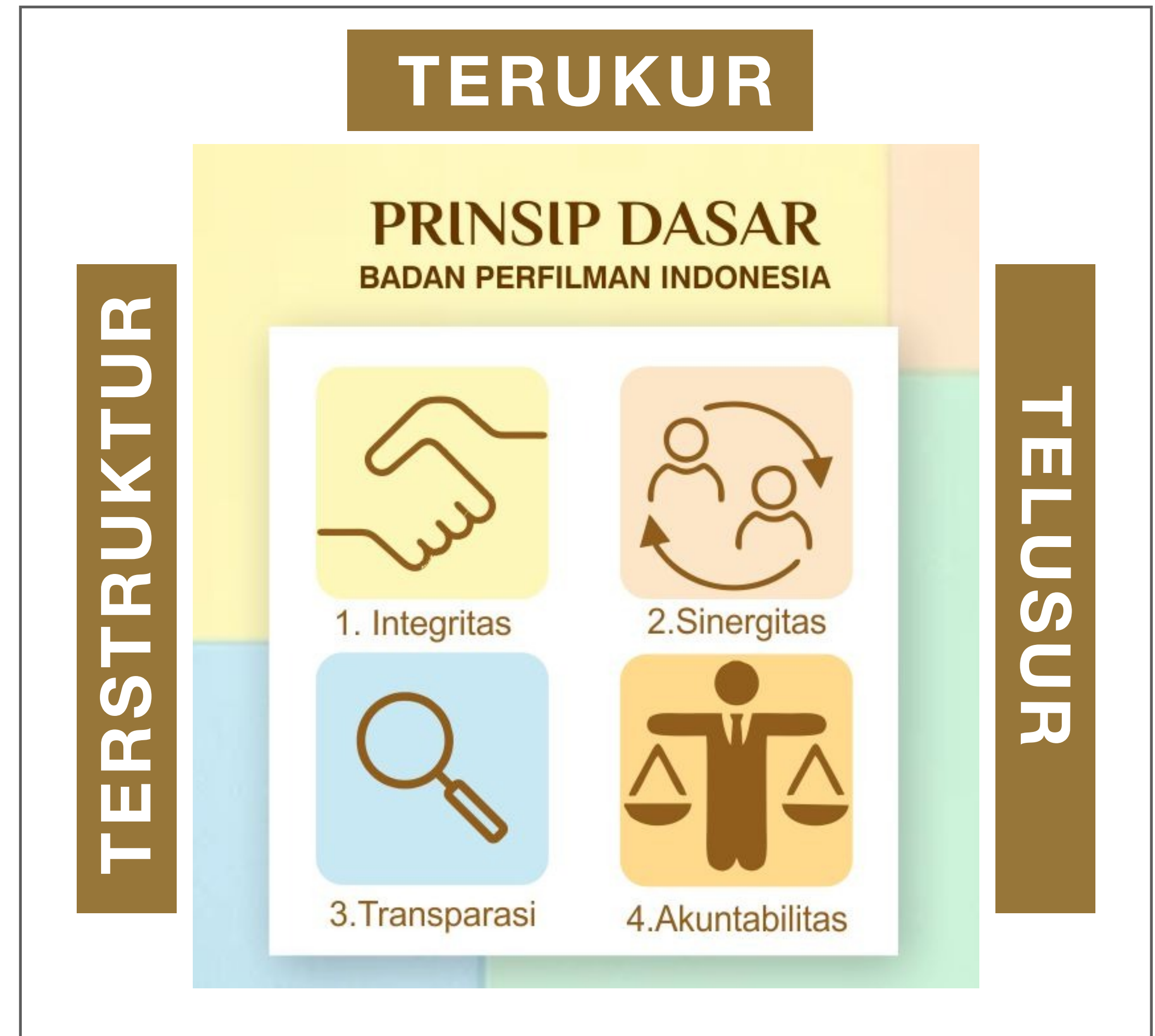
Ketua Bidang Pengembangan Bisnis dan Pembiayaan

Ketua Bidang Promosi dan Hubungan Luarnegeri

Ketua Bidang Penyelenggara Kegiatan dan Festival

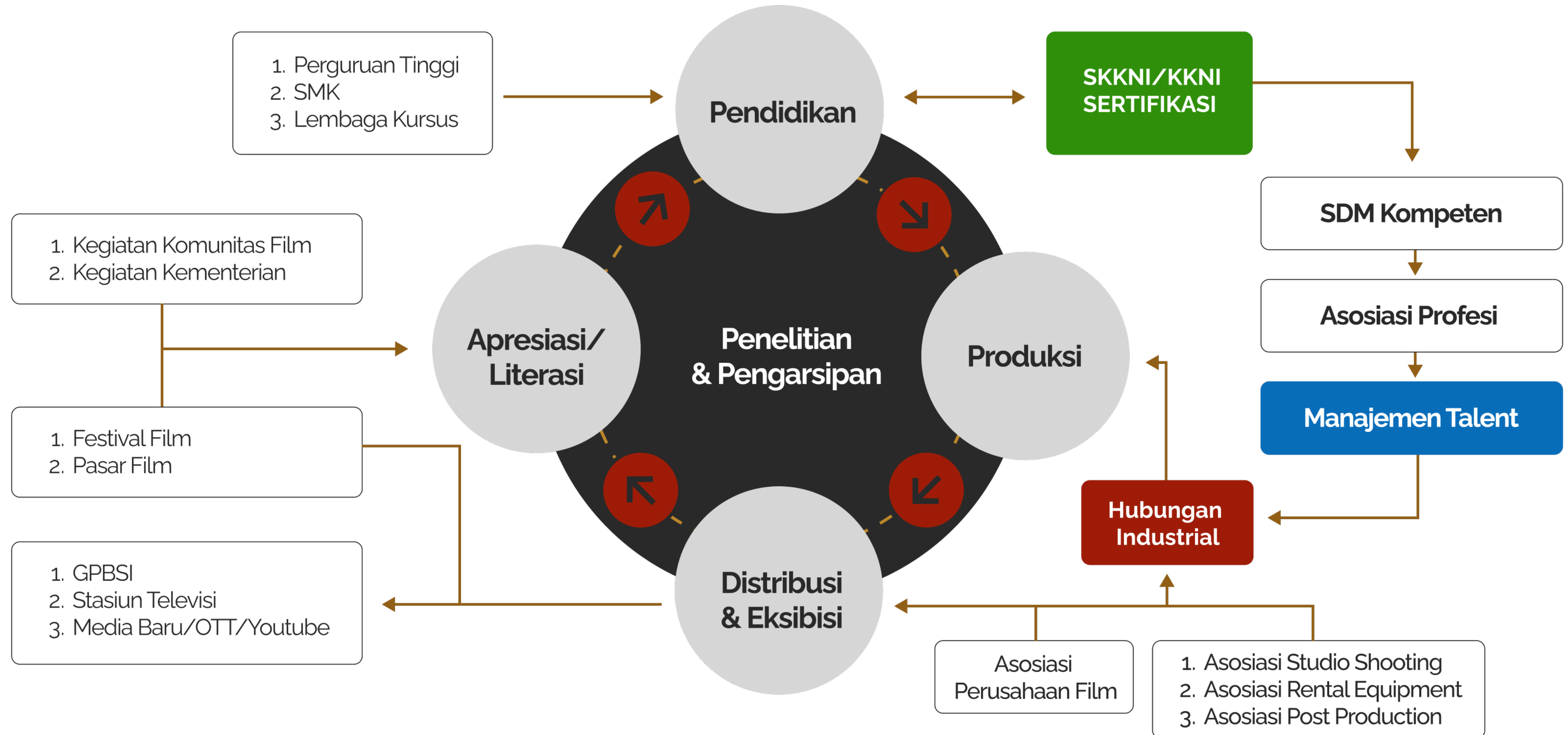
Ketua Bidang Kebijakan dan Advokasi

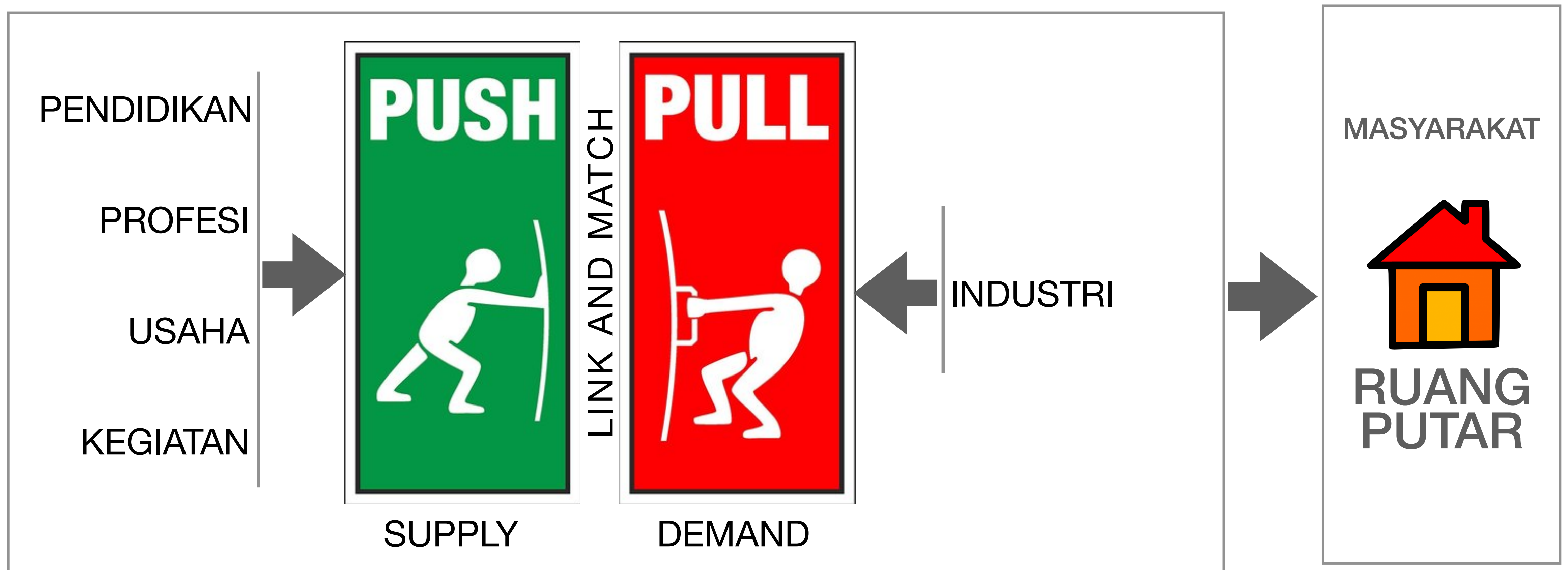
Kesekretariatan



MASALAH PERFILMAN INDONESIA DULU DAN SEKARANG

Ekosistem Perfilman Indonesia

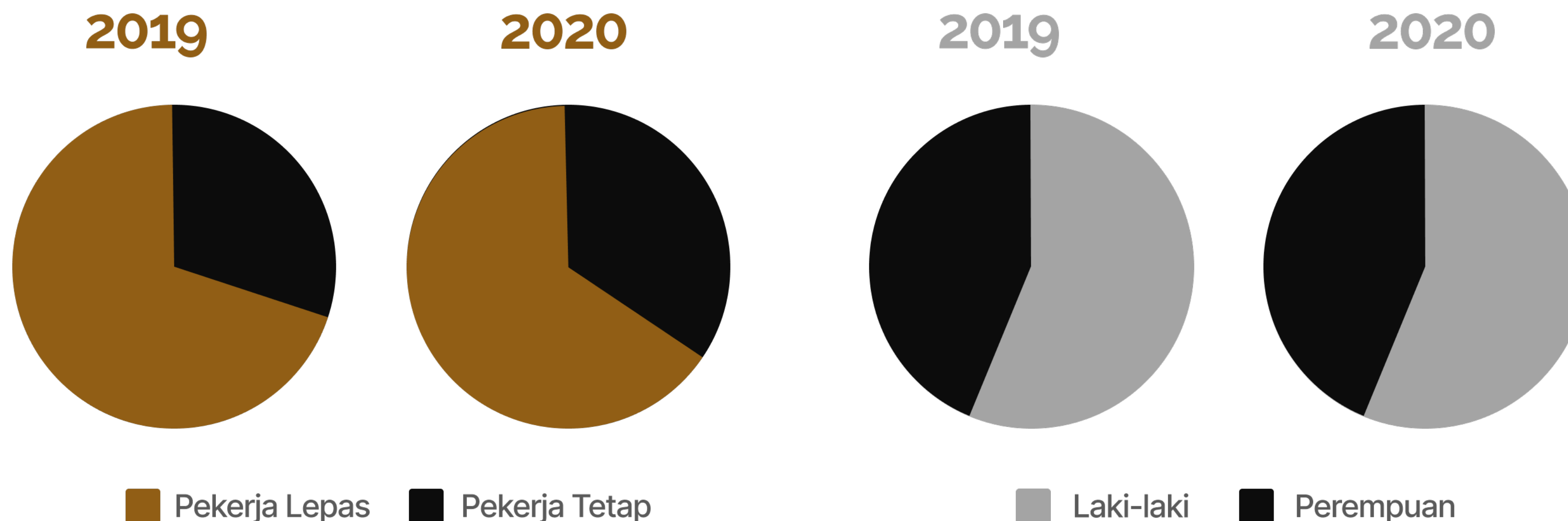




KONDISI PERFILMAN INDONESIA SAAT INI

Struktur Pekerja Film

Karakteristik Pekerja (n=5)



- Proporsi dari pekerja lepas di Industri film tinggi dibandingkan dengan proporsi pekerja tetap. Sedangkan, untuk animasi sendiri lebih didominasi oleh pekerja lepas dibandingkan dengan pekerja tetap.
- Proporsi laki-laki di subsektor film lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Analisa Kondisi Faktual Pekerja Film

Penawaran Tenaga Kerja Tahun 2019

(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)
Jumlah yang bekerja	Prediksi potensi tenaga kerja	Total Penawaran	Prediksi Tingkat Upah (Rp)
42,062	46,670	88,732	1,258,951

Penawaran Tenaga Kerja Tahun 2020

(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)
Jumlah yang bekerja	Prediksi potensi tenaga kerja	Total Penawaran	Prediksi Tingkat Upah (Rp)
42,102	64,166	106,268	1,187,168

Penawaran Tenaga Kerja & Tingkat Upah

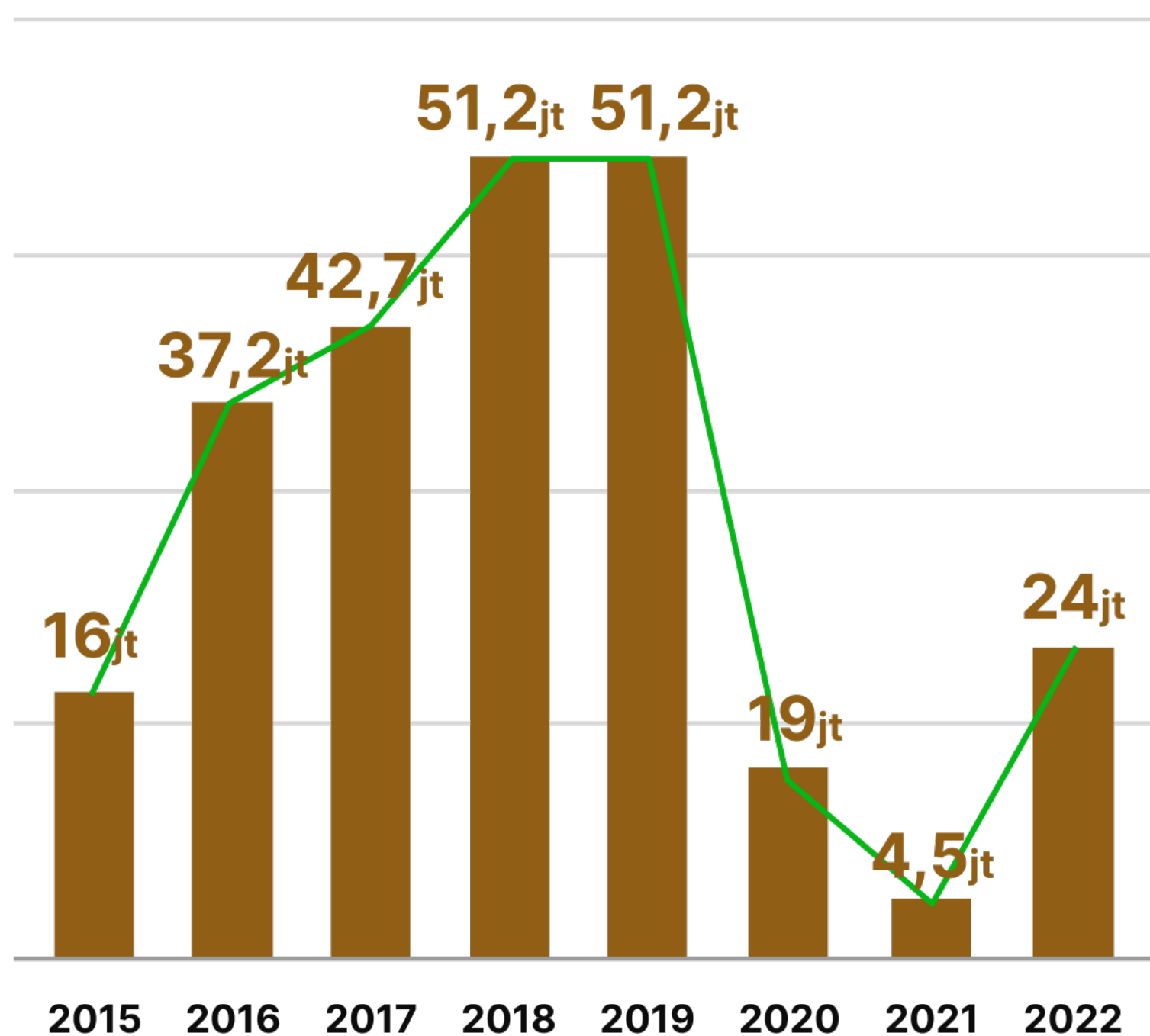
Penawaran 2019-2020 (%)

19.76

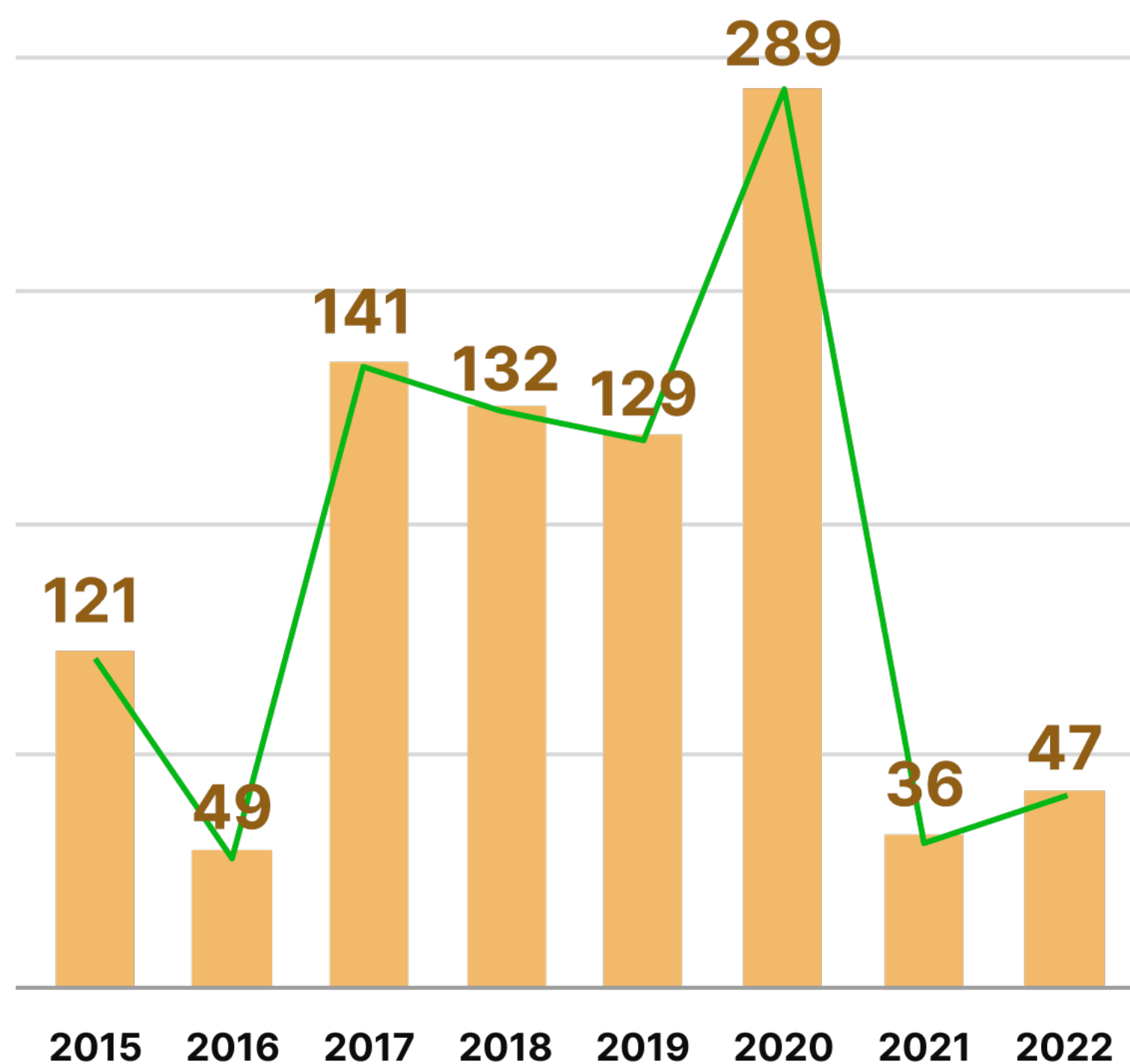
Penawaran 2019-2020 (%)

-5.70

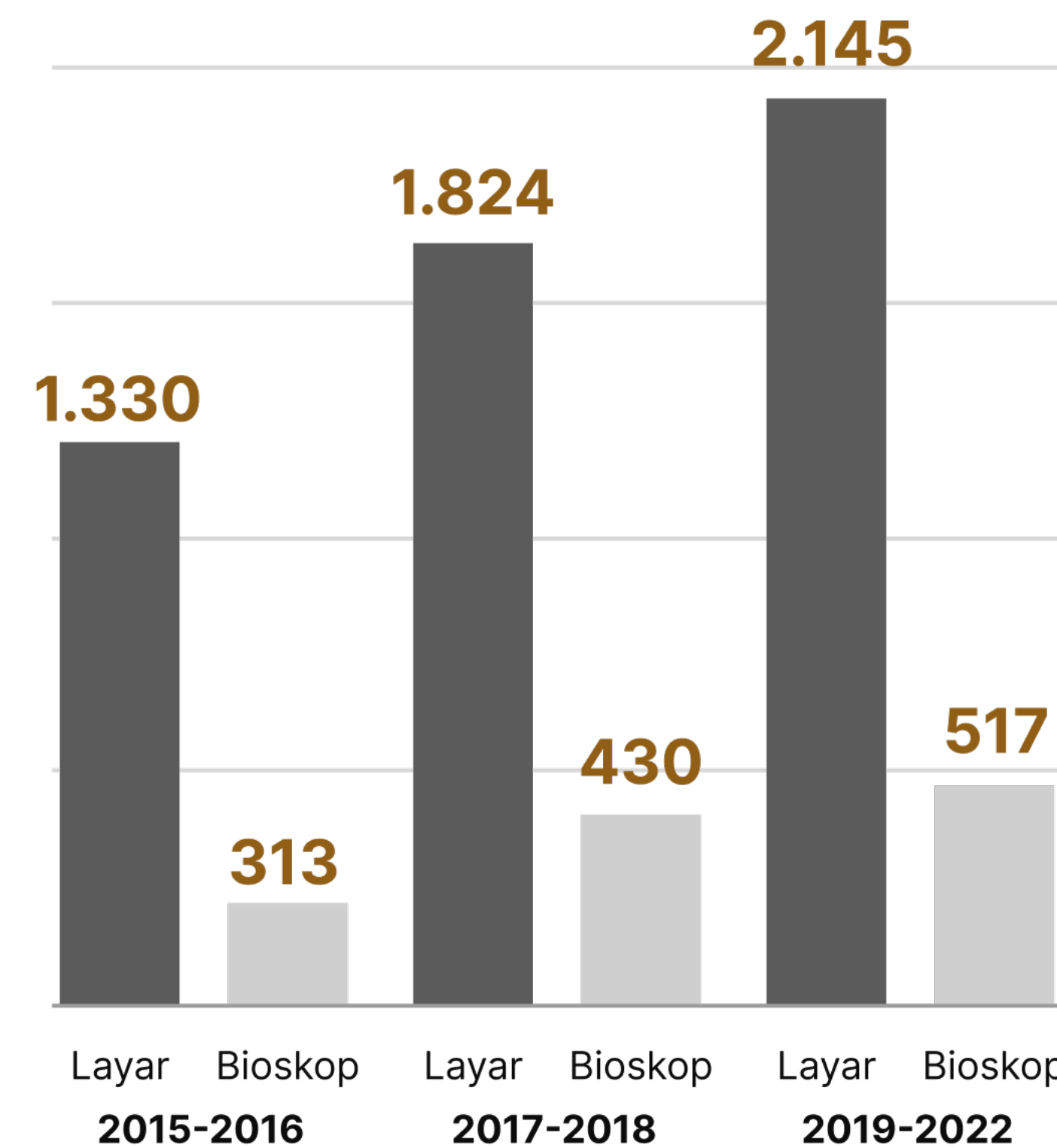
Penonton Film Nasional



Produksi Film Nasional



Bioskop & Layar

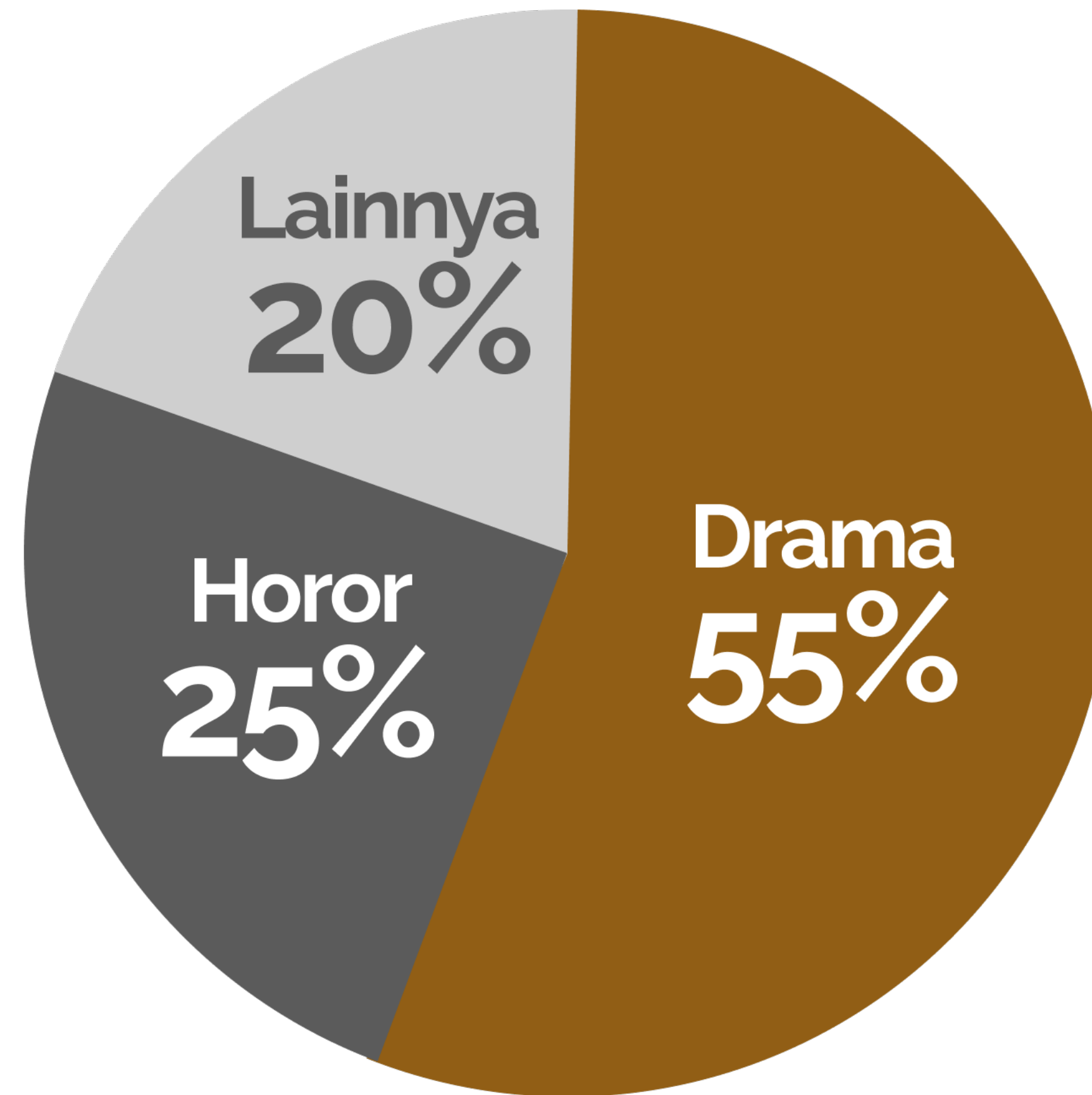


Sumber Data

1. LSF
2. GPBSI
3. PPFI
4. APFI
5. filmindonesia.id
6. Kompas

44
Judul

Film Layar Lebar
Kuartal 1 Tahun 2022



Sumber : LSF

Rekapitulasi Jumlah Penonton Film Nasional 2019

Per 15 Jan 2019

No	Rentang	Jumlah Film	Jumlah Penonton	Persentase	
1	3 juta - 7 juta	1	5.253.411	10%	57% (15 Judul)
2	2 juta - 3 juta	4	9.677.923	19%	
3	1 juta - 2 juta	10	14.529.943	28%	
4	500 ribu - 1 Juta	17	11.671.230	23%	39% (59 Judul)
5	250 ribu - 500 ribu	10	3.477.012	7%	
6	100 ribu - 250 ribu	32	5.115.875	10%	
7	50 ribu - 100 ribu	15	1.088.699	2%	4% (55 Judul)
8	25 ribu - 50 ribu	18	673.198	1%	
9	Di bawah 25 ribu	22	227.048	0%	
Total		129	51.714.339	100%	

Sumber : filmindonesia.id

Rekapitulasi Jumlah Penonton Film Nasional 2022

Per 23 Maret 2022

No	Rentang	Jumlah Film	Jumlah Penonton	Persentase	
1	> 7 Juta	1	9.233.847	38,383%	72,3% (5 Judul)
2	3 juta - 7 juta	-	-		
3	2 juta - 3 juta	2	5.085.497	21,139%	
3	1 juta - 2 juta	2	3.077.381	12,792%	
4	500 ribu - 1 Juta	5	3.107.165	12,916%	25% (16 Judul)
5	250 ribu - 500 ribu	5	2.005.465	8,336%	
6	100 ribu - 250 ribu	6	984.351	4,092%	
7	50 ribu - 100 ribu	4	248.937	1,035%	2% (26 Judul)
8	25 ribu - 50 ribu	3	117.252	0,487%	
9	Di bawah 25 ribu	19	197.375	0,820%	
Total		47	24.057.270	100%	

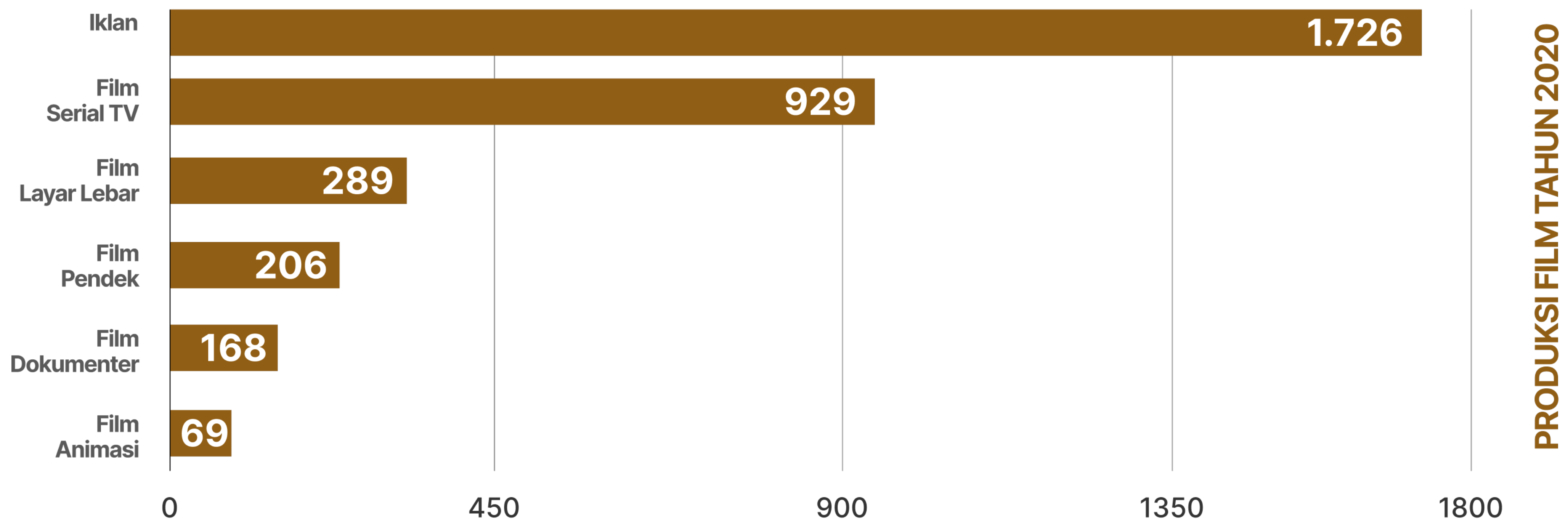
Sumber : filmindonesia.id

10 Film Terlaris di Indonesia

Tahun 2016-2022

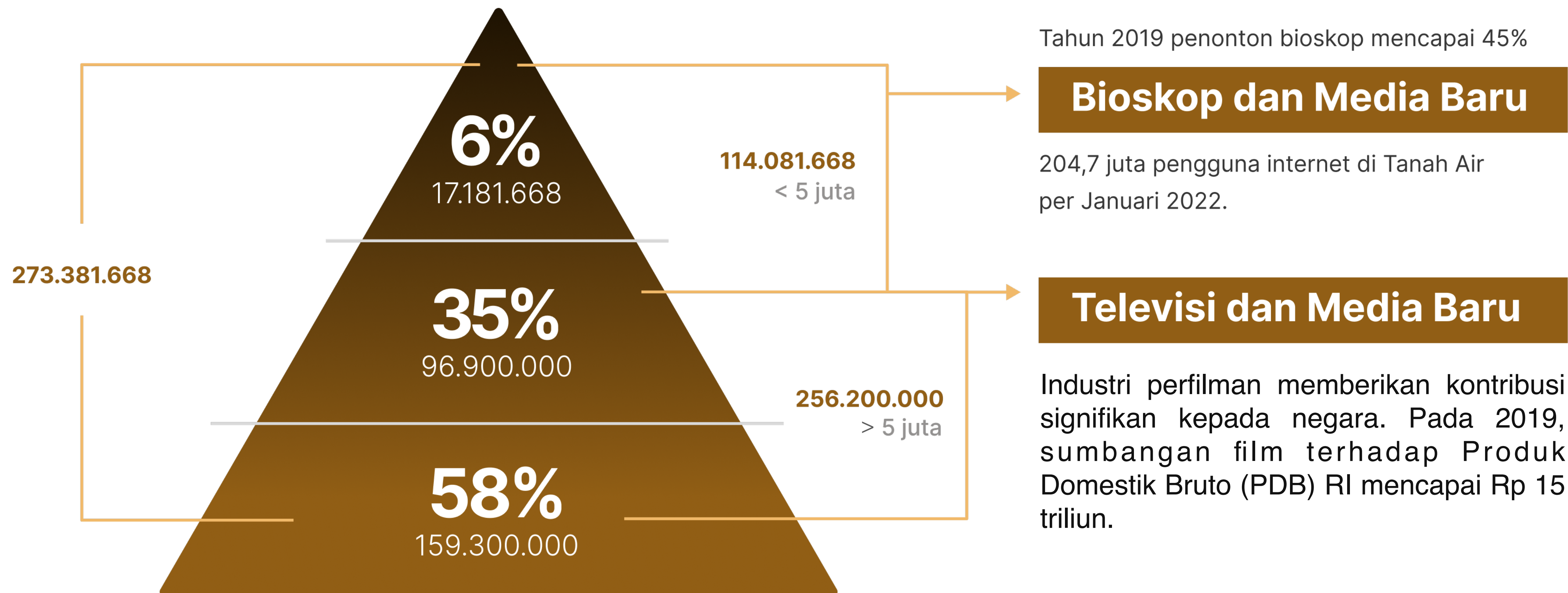
No	Judul Film	Tahun	Penonton
1	Avenger: Endgame	2019	11.245.000
2	KKN di Desa Penari	2022	9.153.723
3	Spider-Man; No Way Home	2021	8.790.509
4	Avenger: Infinity War	2018	8.121.000
5	Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1	2016	6.858.616
6	Doctor Strange in The Multiverse of Madness	2022	6.329.085
7	Dilan 1990	2018	6.315.664
8	Captain Marvel	2019	6.298.000
9	The Fate of The Furious	2017	5.945.000
10	Aquaman	2017	5.882.000

Kondisi Perfilman Indonesia sebelum pandemi **Covid-19**. Ada sebanyak **3.423** produksi film di Indonesia pada tahun **2020**. Tercatat, produksi iklan merupakan yang terbanyak mencapai **1.762** produksi atau sekitar **51,47%** dari total produksi film dalam negeri.

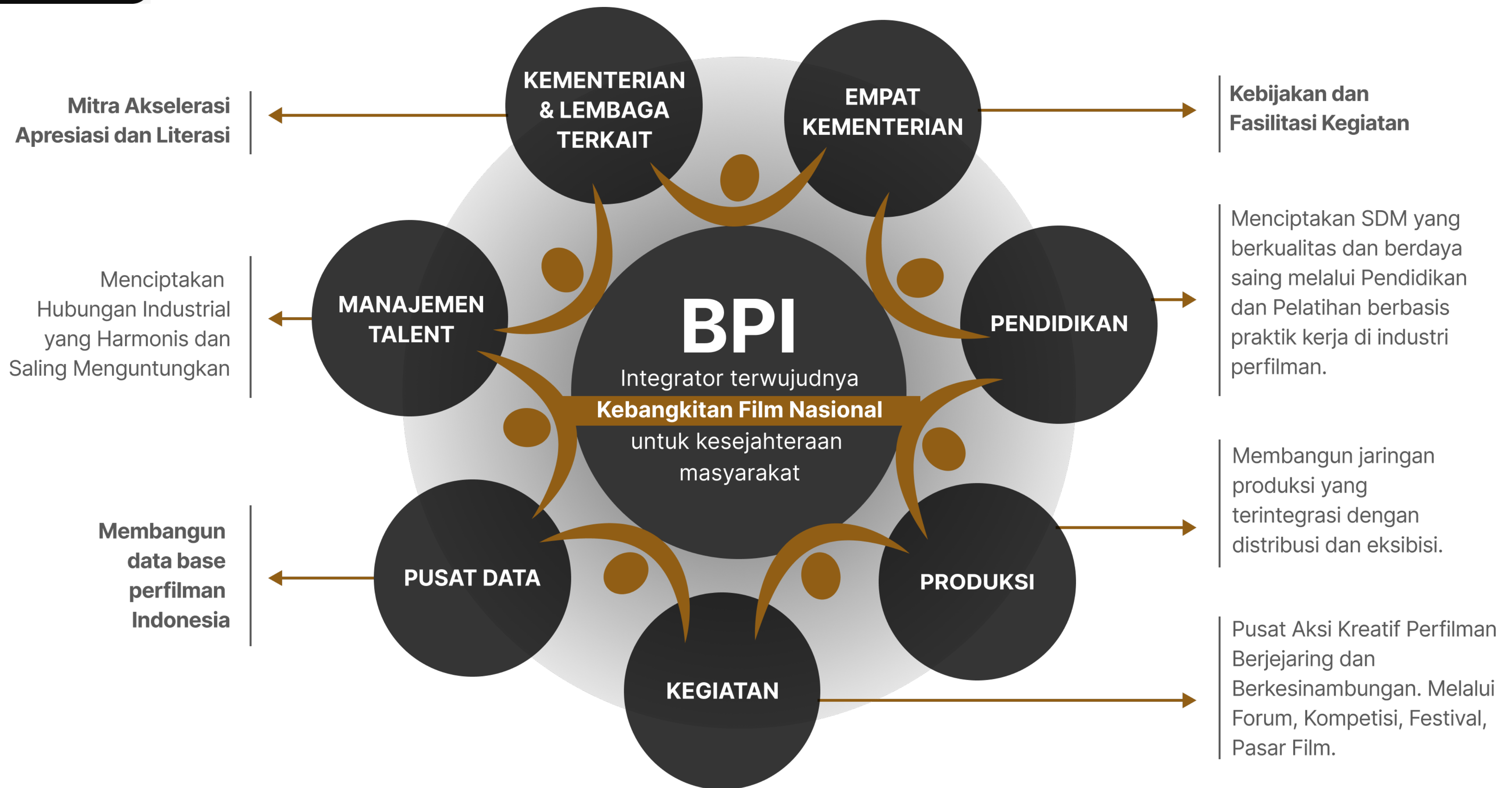


Infografis Pasar Audio Visual

Berdasarkan Pendidikan dan Ekonomi



KEBANGKITAN PERFILMAN NASIONAL



Rumusan Tujuan

Perfilman Indonesia

Tujuan Utama

Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat baik material, spiritual maupun sosial.

Fungsi Utama

1. Ilmu
2. Karya Seni Budaya
3. Media Komunikasi
4. Komoditas

Fungsi Kunci

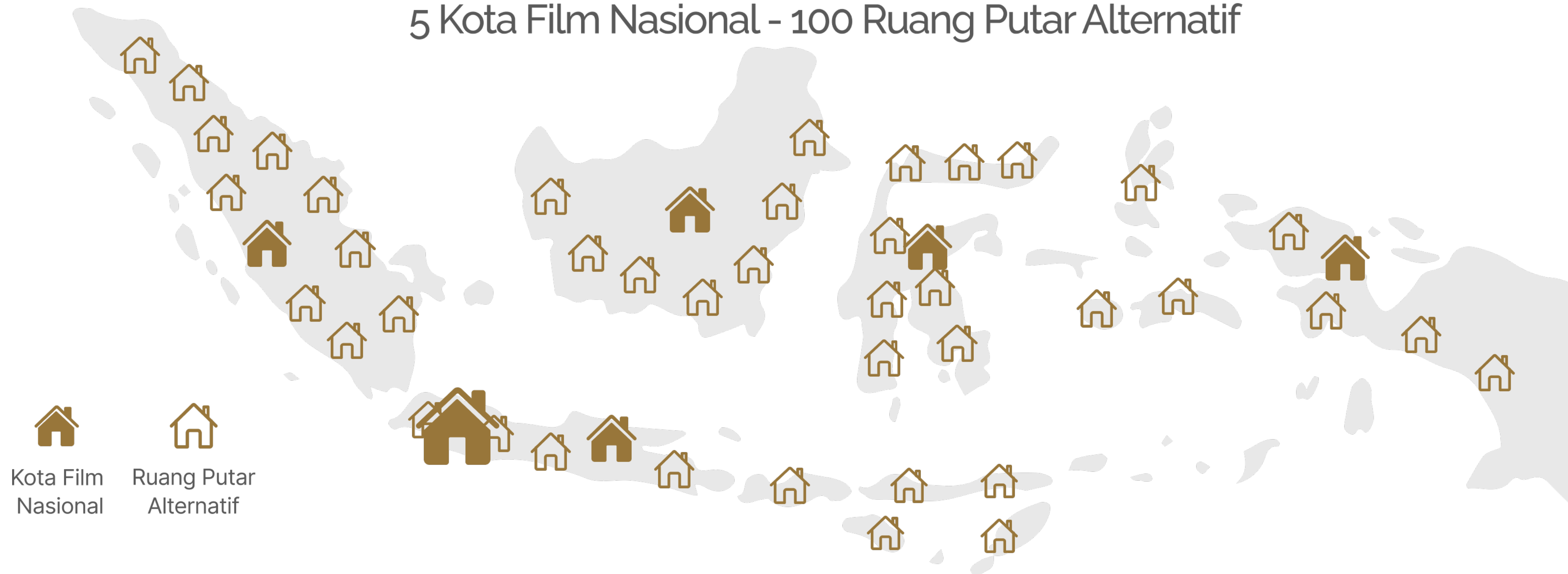
- a. Pendidikan
- b. Budaya
- c. Hiburan
- d. Informasi
- e. Ekonomi
- f. Pendorong Karya Kreatif

Fungsi Dasar

- a. Terbinanya akhlak mulia;
- b. Terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Meningkatnya harkat dan martabat bangsa;
- e. Berkembangnya dan lestariannya nilai budaya bangsa;
- f. Dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional;
- g. Berkembangnya film berbasis budaya bangsa.

Kebangkitan Film Nasional

5 Kota Film Nasional - 100 Ruang Putar Alternatif



“Jika ingin bicara wawasan Nusantara dalam film maka kita harus membangun film nasional dari seluruh pelosok negeri yang kaya budaya. Membangun manusia Indonesia yang berkarakter”

Ki Demang Soemardjono

Bapak pendidikan Perfilman Nasional/Ketua Umum Pertama KFT Indonesia

USULAN

Revitalisasi Ekosistem Perfilman Indonesia

Rencana Induk Perfilman Indonesia

Perubahan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman

38 Peraturan dan Perundang-Undangan sebagai
objek kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum
Perfilman untuk **Rencana Induk Perfilman Nasional**

Undang-Undang

21

(dua puluh satu)

Peraturan Pemerintah

8

(delapan)

Peraturan Presiden

1

(satu)

Peraturan Menteri

8

(delapan)

Kekuatan Baru Perfilman Nasional



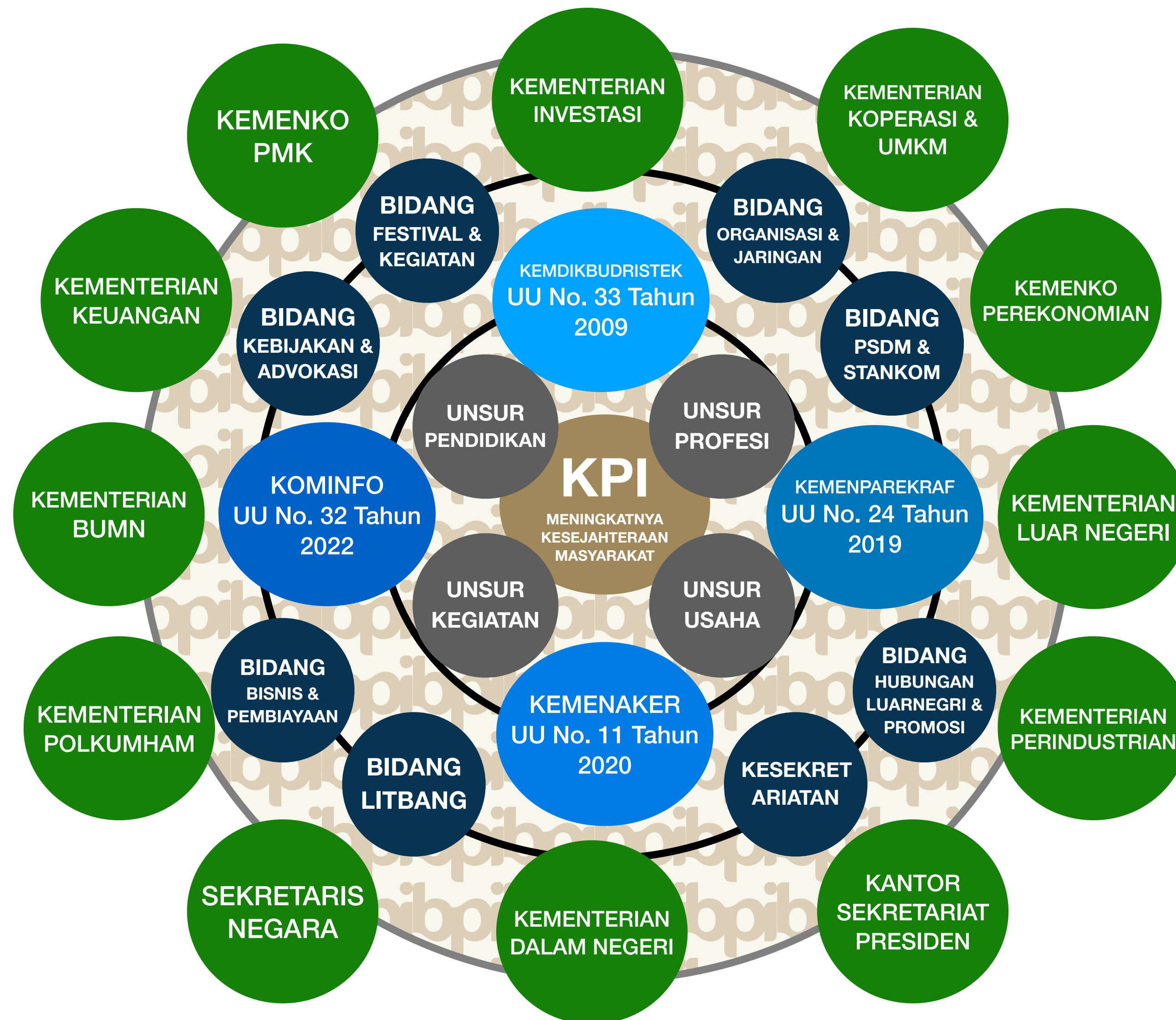
Integrator

7 Bidang

4 Unsur

4 Kementerian
Utama

12 Kementerian
Terkait





STANDING POSITION SUMBER DANA



Terima

Kasih

